



LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LAKIP)

**TAHUN
2022**

**DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**Jl. Dewi Sartika No. 45 Palu
Sulawesi Tengah 94121**

Telepon/Fax : (0451) 483942

Email : sulteng.pariwisata@gmail.com

Website : www.disparekrafsteng.com



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022, mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Program dan Kegiatan selama 1 (satu) tahun. Laporan ini pada khususnya menggambarkan Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Dari hasil Evaluasi Kinerja, diperoleh gambaran bahwa capaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah pada 2022 dengan dukungan dana APBD **sebesar Rp. 23.184.113.746,-** Dari anggaran yang tersedia tersebut dapat direalisasikan sebesar **Rp. 22.237.996.844,-** atau sebesar **95,92 %**.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut, masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam upaya pengoptimalisasian kinerja sehingga sangat diperlukan koreksi / perbaikan dan penyempurnaan secara optimal dan menyeluruh pada kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

Kepada pihak-pihak terutama kepada seluruh pejabat dan staf Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang telah bekerjasama dalam pencapaian program kegiatan yang dilakukan tahun 2022, kami tak lupa menyampaikan terima kasih.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian didalam meningkatkan semangat kerja dan profesionalisme dibidang tugas masing-masing.

Palu, Januari 2022

**KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

**Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680825 199412 2 006**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Cascading Kinerja	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
1.3. Isu-Isu Strategis	11
1.4. Dukungan SDM, Sarana dan Prasarana	12
1.5. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021 ...	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	15
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan	15
2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022	17
2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)	21
2.5. Perjanjian Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1. Capaian Kinerja	22
3.2. Efisiensi Anggaran dan Realisasi Anggaran	29
BAB IV PENUTUP	32
4.1. Kesimpulan	32
4.2. Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kinerja	32
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	

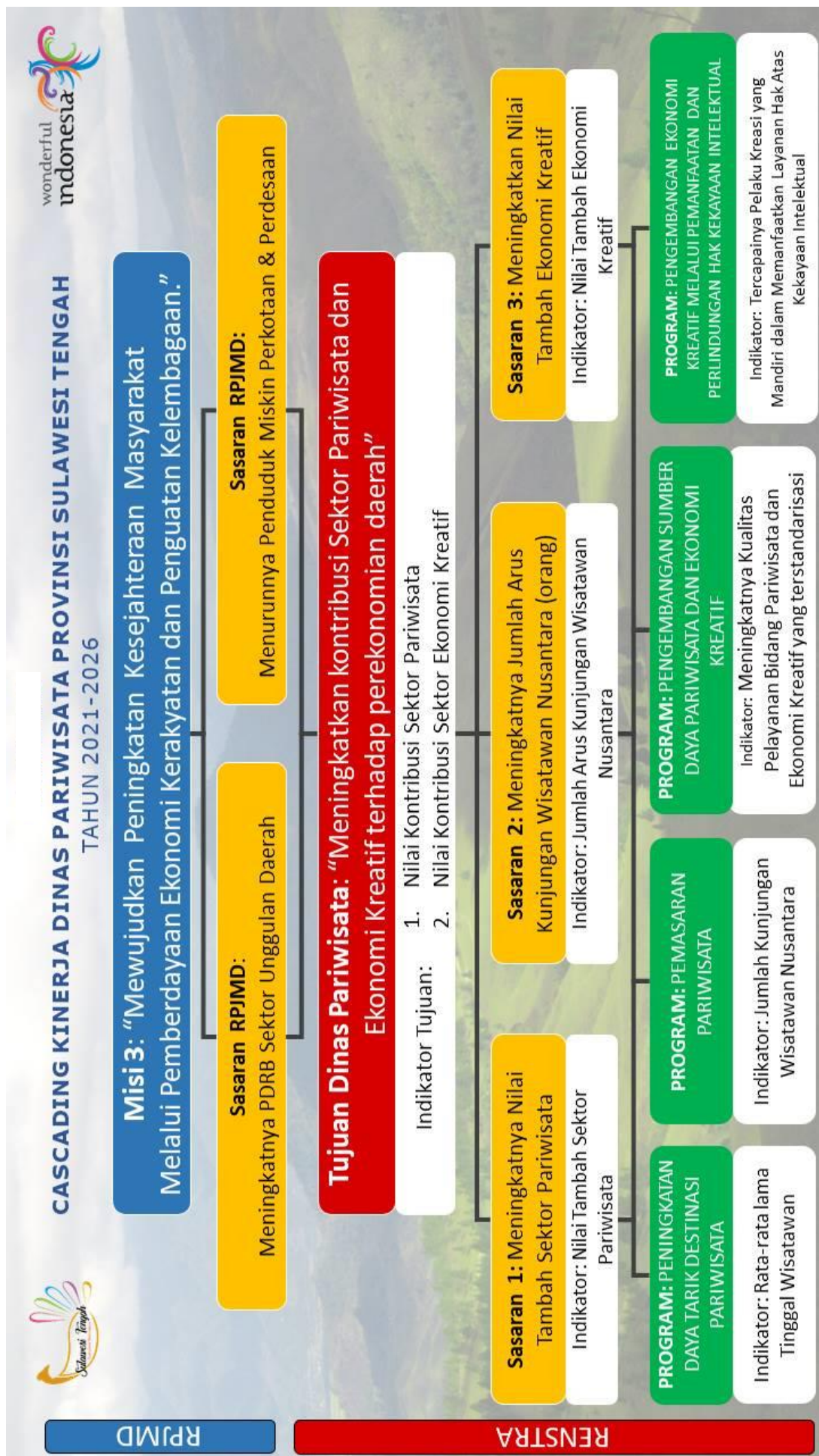


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH 2022

Disusun oleh :
DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jl. Dewi Sartika No.45 Palu 94121
Telp. 0451 483942 Fax. 483941
Email : sulteng.pariwisata@gmail.com
Website : www.disparekrafslteng.com

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Cascading Kinerja





PROGRAM: PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA



KEGIATAN 01: PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI

Indikator: Jumlah Daya Tarik Wisata Provinsi yang terstandar pengelolannya

4 Sub-kegiatan

Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi

Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi

Perencanaan dan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi

Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi

Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan, berkembang, pematangan, revitalisasi)

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Unggulan Provinsi

Jumlah dokumen Rekomendasi Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi

KEGIATAN 02: PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI

Indikator: Jumlah DTW Di KSP yang Terstandar Pengelolannya

7 Sub-kegiatan

Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

Jumlah Kawasan Pariwisata Provinsi yang dikembangkan

Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

Jumlah Laporan hasil Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

Jumlah lokasi yang menerapkan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

KEGIATAN 03: PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA PROVINSI

Indikator: Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi Yang Terstandar Pengelolannya

7 Sub-kegiatan

Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi

Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang ditetapkan

Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi

Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi

Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi

Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan, berkembang, pematangan, revitalisasi)

Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang tersedia dan terpelihara

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

Jumlah Laporan hasil Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

Jumlah lokasi yang menerapkan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

KEGIATAN 04: PENETAPAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

Indikator: Meningkatnya SDM/ Pelaku Usaha Pariwisata tentang TDUP

5 Sub-kegiatan

Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Jumlah dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata daerah Kab/Kota

Jumlah penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota

Pengelolaan Investasi Pariwisata

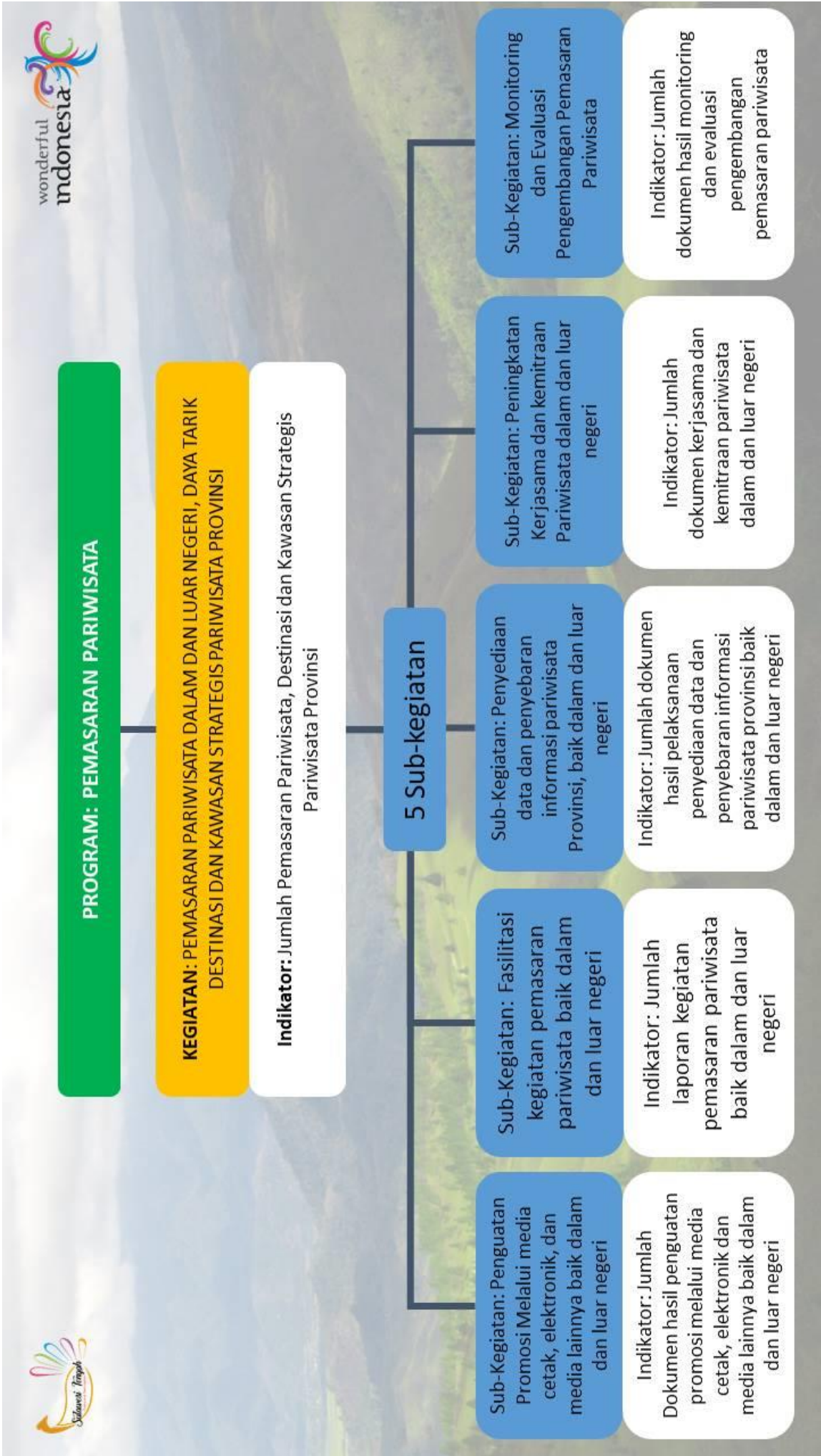
Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata

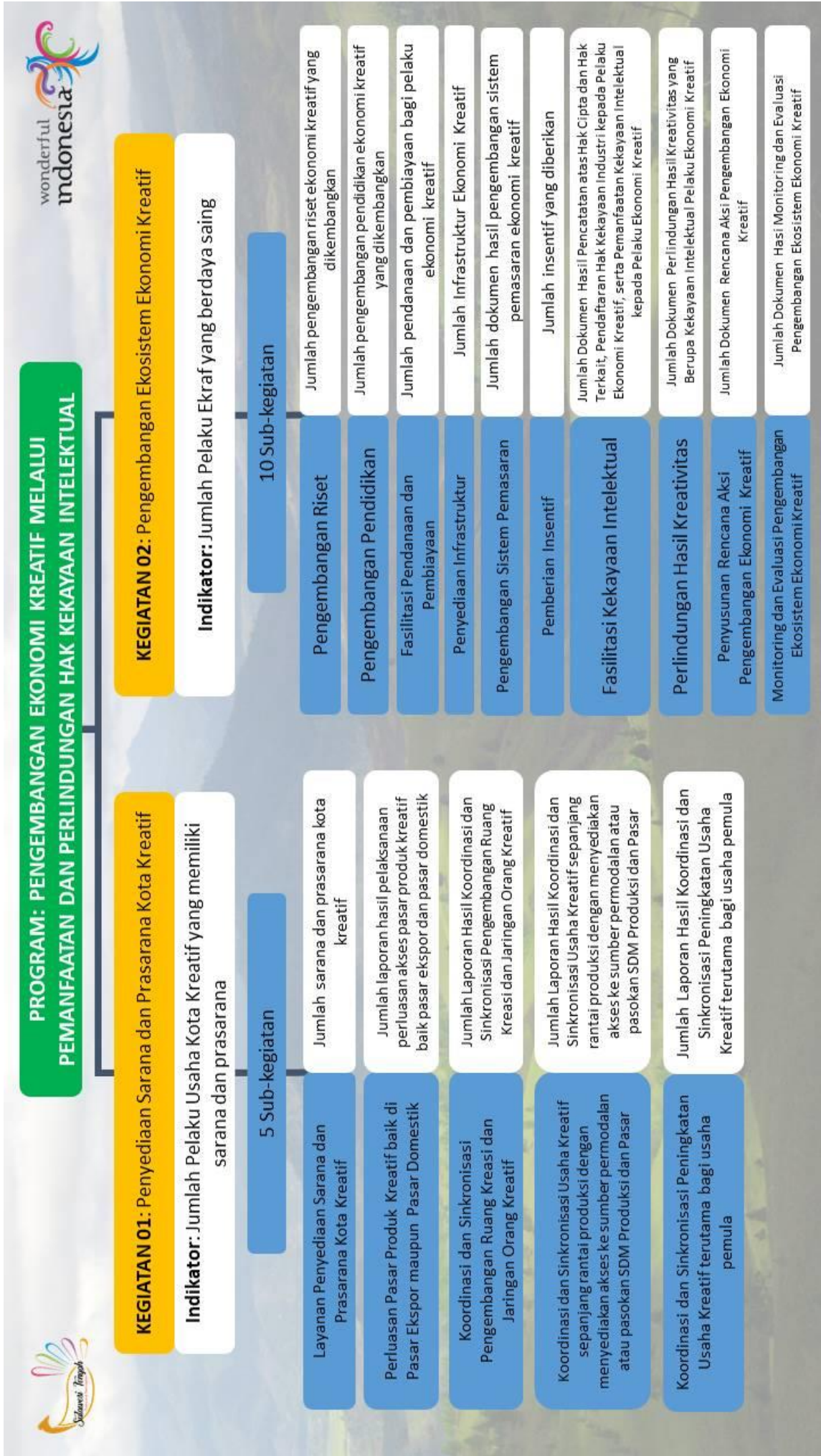
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata

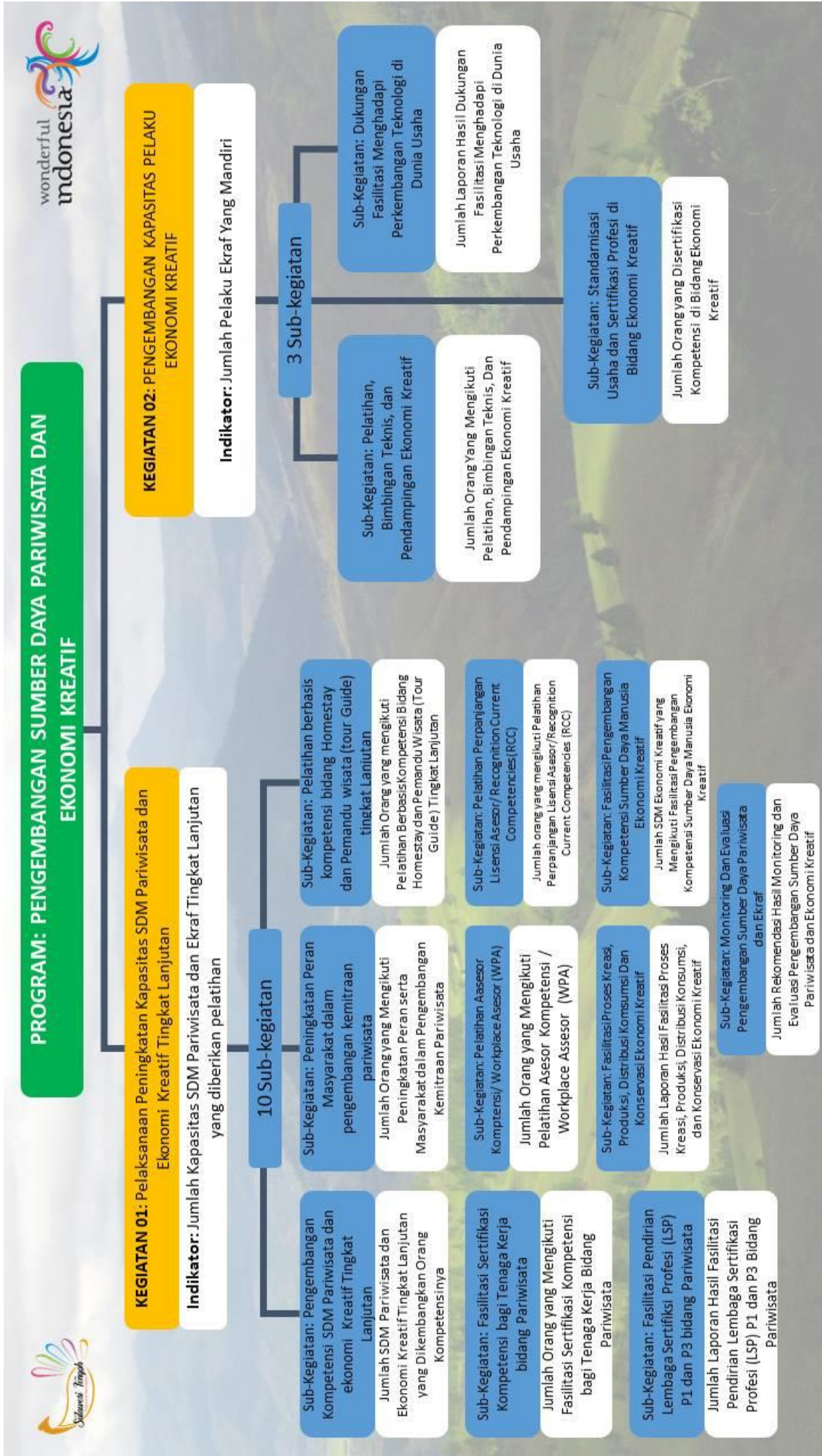
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata

Fasilitas Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata

Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memperoleh standarisasi dan sertifikasi







1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah adalah untuk membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

2. Fungsi

Fungsi Dinas Pariwisata Propinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Industri Pariwisata, dan Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataaan;
2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pengembangan Destinasi, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Industri Pariwisata, dan Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataaan; .
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Destinasi, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Industri Pariwisata, dan Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataaan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pengembangan Destinasi, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Industri Pariwisata, dan Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataaan;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas fungsinya.

1. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi yang diuraikan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

a. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

- **Kepala Dinas**
- **Sekretaris**

1. Sub Bagian Keuangan dan Asset
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

- **Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata**
- **Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata**
- **Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**
- **Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**
- **Kelompok Jabatan Fungsional**

b. Tugas Sekretariat dan Bidang-Bidang

1. SEKRETARIAT DINAS

Sekretariat Dinas dikepalai oleh seorang pejabat Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan perencanaan program, pengelolaan keuangan dan asset, serta pengelolaan kepegawaian dan umum, dan korpri di lingkungan dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum dan Korpri.
2. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum dan Korpri.
3. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum dan Korpri.
4. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum dan Korpri.
5. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum dan Korpri.
6. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan, dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan terkait sesuai tugas dan fungsinya.

3. BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

Bidang Pengembangan Destinasi dikepalai oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi perwilayahan, investasi pariwisata, infrastruktur dan ekosistem pariwisata, atraksi dan tata kelola destinasi.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, kepala bidang pengembangan destinasi pariwisata mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perwilayahan dan investasi pariwisata, infrastruktur dan ekosistem, atraksi dan tata kelola *destinasi*.
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perwilayahan dan investasi pariwisata, infrastruktur dan ekosistem, atraksi dan tata kelola destinasi.
3. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perwilayahan dan investasi pariwisata, infrastruktur dan ekosistem, atraksi dan tata kelola destinasi.
4. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang perwilayahan dan investasi pariwisata, infrastruktur dan ekosistem, atraksi dan tata kelola destinasi.
5. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pengembangan destinasi pariwisata.
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

Bidang Pemasaran Pariwisata dikepalai oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pengembangan segmen pasar, personal bisnis dan pemerintah, pengembangan analisis data pasar, pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata dan strategi pemasaran pariwisata.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan segmen pasar, personal bisnis dan pemerintah, pengembangan analisis data pasar, pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata dan strategi pemasaran.
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan segmen pasar, personal bisnis dan pemerintah, pengembangan analisis data pasar, pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata dan strategi pemasaran.
3. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pengembangan segmen pasar, personal bisnis dan pemerintah, pengembangan analisis data pasar, pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata dan strategi pemasaran.
4. Pelaksanaan penyelenggaraan strategi pemasaran pariwisata dan mancanegara dan nusantara, analisi data pasar, pengembangan segmen pasar, personal bisnis dan pemerintah, serta komunikasi pemasaran pariwisata berdasarkan program dan kebijakan untuk pengembangan pemasaran pariwisata.
5. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pengembangan segmen pasar, personal bisnis dan pemerintah, pengembangan analisa pasar, komunikasi pemasaran pariwisata dan strategi pemasaran pariwisata.
6. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pengembangan pemasaran pariwisata.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan oleh sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan bahan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, investasi usaha pariwisata, dan pembinaan ekonomi kreatif.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pengembangan Industri mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, kemitaraan usaha pariwisata, investasi usaha pariwisata dan pembinaan ekonomi kreatif.
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, kemitaraan usaha pariwisata, investasi usaha pariwisata dan pembinaan ekonomi kreatif.
3. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, kemitaraan usaha pariwisata, investasi usaha pariwisata dan pembinaan ekonomi kreatif.
4. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, kemitaraan usaha pariwisata, investasi usaha pariwisata dan pembinaan ekonomi kreatif.
5. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pengembangan industri pariwisata.
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata di pimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pengembangan SDM Aparatur dan Mitra Pariwisata, penelitian dan pengembangan kepariwisataan dan pengendalian dan transformasi kepariwisataan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang pengembangan Kelembagaan Kepariwisata memiliki fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan SDM aparatur dan mitra pariwisata, penelitian pengembangan kepariwisataan serta pengendalian transformasi kepariwisataan.

2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan SDM aparatur dan mitra pariwisata, penelitian pengembangan kepariwisataan serta pengendalian transformasi kepariwisataan.
3. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pengembangan SDM aparatur dan mitra pariwisata, penelitian pengembangan kepariwisataan serta pengendalian transformasi kepariwisataan.
4. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pengembangan SDM aparatur dan mitra pariwisata, penelitian pengembangan kepariwisataan serta pengendalian transformasi kepariwisataan.
5. Pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja pariwisata, workshop/bimtek pengembangan SDM aparatur dan mitra usaha kepariwisataan.
6. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pengembangan kelembagaan kepariwisataan.
7. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Isu - Isu Strategis

Berdasarkan pada identifikasi permasalahan yang ada dan telaahan visi dan misi pembangunan pariwisata, sasaran jangka menengah sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka sudah tergambar dengan jelas tentang pelayanan OPD Dinas Pariwisata Daerah Sulawesi Tengah. Dari gambaran pelayanan tersebut bila ditinjau dari aspek implikasi RTRW dan KLHS, dapat dikemukakan hal-hal penting yang akan menjadi agenda Prioritas dalam Pembangunan Pariwisata Daerah Sulawesi Tengah.

Beberapa isu strategis yang perlu dikemukakan yaitu :

1. Pemulihan dan perbaikan sarana prasarana pada obyek wisata yang terdampak bencana
2. Pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam peruntukan pariwisata yang belum optimal.
3. Pengembangan dan peningkatan daya tarik obyek wisata untuk pembentukan kawasan strategis pariwisata provinsi.
4. Perlunya penyusunan berbagai penelitian dan kajian tentang potensi pariwisata daerah.

5. Pengembangan wisata berbasis pedesaan (desa wisata) yang akan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di pedesaan.
6. Perlunya koordinasi terpadu lintas sektoral untuk Percepatan Pembangunan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang diharapkan dapat merumuskan rencana aksi dan tindak lanjut untuk pembangunan dan pengembangan pariwisata Sulawesi Tengah.
7. Pengembangan Daya pariwisata daerah mengacu pada pembangunan berwawasan lingkungan berdasarkan KLHS.
8. Pentingnya mendorong para pelaku Ekraf untuk dapat memanfaatkan layanan Hak Atas Kekayaan Intelektual
9. Peningkatan kualitas kemampuan Sumber Daya Manusia aparatur bidang pariwisata, mitra usaha pariwisata, tenaga kerja pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif serta mendorong pelaksanaan sertifikasi bagi tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
10. Pembuatan paket wisata dan peningkatan promosi pemasaran pariwisata yang berbasis digital.
11. Peningkatan kemitraan pemasaran di antara para pelaku pariwisata, baik antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan swasta maupun antar pelaku industri pariwisata di sektor swasta.
12. Koordinasi dan sinkronisasi data-data kepariwisataan antar bidang maupun lintas sektoral.

1.4. Dukungan Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana

1.4.a Sumber Daya Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam Penyelenggaraan TUPOKSI Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan kondisi kepegawaian pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Jumlah Serta Susunan Personil Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Golongan Per 31 Desember 2022

PEGAWAI	JUMLAH
Golongan IV	11 Orang
Golongan III	42 Orang
Golongan II	7 Orang
Jumlah	60 Orang

**Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah
Sesuai Jabatan Per 31 Desember 2022**

Pegawai	Jumlah
Eselon II	1 Orang
Eselon III	4 Orang
Eselon IV	2 Orang
Fungsional	11 Orang
Pelaksana	42 Orang
Jumlah	60 Orang

**Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan
Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2022**

Tingkat Pendidikan	Jumlah
S2	13 Orang
S1	34 Orang
Sarjana Muda/D3	2 Orang
S L T A	11 Orang
Jumlah	60 Orang

1.4.b. Aset Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, maka ketersediaan Sumber Daya Manusia (*human resources*), sarana dan prasarana penunjang dibutuhkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Adapun nilai asset tetap berupa sarana dan prasarana bagi aparatur Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Neraca Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Rekapitulasi Jumlah Aset Tetap Dinas Pariwisata
Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 31 Desember 2022**

No.	Uraian	Jumlah
1.	Tanah	Rp. 10.780.480.000,-
2.	Peralatan dan Mesin	Rp. 6.450.259.147,-
3.	Gedung dan Bangunan	Rp. 37.569.420.060,06
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 2.274.294.111,10
5.	Aset Tetap Lainnya	Rp. 229.650.000,-
6.	Aset Lainnya	Rp. 7.302.739.750,-
	Total	Rp. 64.606.843.068,16

1.5. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan nilai capaian sebesar 78,17. Capaian tersebut termasuk dalam kategori Sangat Baik yaitu akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal yang meliputi 5 komponen penilaian dengan rincian sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja mendapat nilai 27,64
2. Pengukuran Kinerja mendapat nilai 20,94
3. Pelaporan Kinerja mendapat nilai 13,88
4. Evaluasi Internal mendapat nilai 3,84
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi mendapat nilai 11,88

Dari hasil evaluasi tersebut, masih terdapat permasalahan yang harus ditindak lanjuti dengan melakukan beberapa perbaikan, yaitu :

- Menginformasikan hasil evaluasi kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui pencapaian dan hambatan yang ditemui serta sebagai bahan evaluasi perbaikan.
- Melaksanakan pemantauan secara berkala agar dapat diketahui tingkat pencapaian dan hambatan serta solusi penyelesaian masalah.
- Mengoptimalkan tindak lanjut hasil evaluasi dalam bentuk langkah nyata.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan strategis Dinas Pariwisata adalah Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap perekonomian daerah. Tujuan ini menunjukkan suatu kondisi yang ingin di capai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang yang akan mengarahkan perumusan sasaran, program serta kegiatan dalam rangka merealisasikan **Misi 3 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.**

Sedangkan **Sasaran strategis meliputi meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata, meningkatnya Jumlah Arus Kunjungan Wisatawan Nusantara dan meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Kreatif.** Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pariwisata dalam kurun waktu satu tahun. Penetapan sasaran di rumuskan lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai dan memiliki kurun waktu satu tahun. Dalam sasaran dirancang pula indikator pencapain sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah diidentifikasi untuk di wujudkan pada tahun bersangkutan dan disertai dengan targetnya masing-masing.

Adapun yang menjadi **Indikator Kinerja Dinas Pariwisata adalah Nilai Kontribusi Sektor Pariwisata dan Nilai Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif.** Indikator Kinerja mempunyai tujuan dan sasaran yang diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu perencanaan strategis secara berkelanjutan (*suistenable*) dan memiliki ukuran secara nyata terhadap tujuan yang ditetapkan di dalam rencana strategis.

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Pembangunan kepariwisataan adalah tugas dan tanggung jawab Pemerintah, Swasta dan seluruh Masyarakat. Keberhasilan pembangunan pariwisata sangat ditentukan oleh adanya kerjasama dan keterpaduan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga harus dilakukan secara terintegrasi.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan pariwisata Sulawesi Tengah diperlukan langkah-langkah strategis dan arah kebijakan pembangunan pariwisata daerah Sulawesi Tengah sesuai uraian dibawah ini.

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas Pengelolaan Destinasi Pariwisata 2. Meningkatkan pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata 3. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Destinasi Pariwisata 4. Meningkatkan pengembangan usaha pariwisata lintas daerah kabupaten/kota
Meningkatkan Pemasaran Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan dan memperluas jaringan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri 2. Mempromosikan potensi Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata
Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2. Meningkatkan pelatihan dan pendampingan sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Meningkatkan pertumbuhan usaha ekonomi kreatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kota kreatif 2. Meningkatkan pembinaan usaha ekonomi kreatif

2.3.1. Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pencapaian Sasaran Tahun 2022

NO.	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/
			PERUBAHAN	PERUBAHAN	BERKURANG
1.	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp 1.625.499.950	Rp 2.685.261.086	
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Rp 163.779.600	Rp 40.234.600	
		Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Rp 163.779.600	Rp 31.017.600	
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DTW Unggulan Provinsi		Rp 9.217.000	
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Rp 15.400.000	
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Rp 15.400.000	
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp 1.374.810.350	Rp 2.462.743.486	
		Pentapan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp 23.600.000	Rp 25.450.000	
		Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp 283.560.000	Rp 662.580.000	
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp 142.438.175	Rp 162.565.600	
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp 822.125.000	Rp 1.342.166.611	
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Provinsi	Rp 103.087.175	Rp 269.981.275	
		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi			
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp 86.910.000	Rp 166.883.000	
		Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			

	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Rp	79.973.000	
	Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Rp	86.910.000	
2.	MEMASARAN PARIWISATA	Rp	5.240.211.000	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rp	5.240.211.000	
	Penguatan Promosi Melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Rp	138.000.000	511.360.000
	Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	Rp	275.000.000	3.509.594.000
	Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Provinsi, baik dalam dan luar negeri	Rp	285.000.000	361.520.000
	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan luar negeri	Rp	535.000.000	857.737.000
3.	PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Rp	1.320.549.715	2.061.742.601
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Rp	886.039.500	1.446.904.181
	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Rp	688.058.500	1.148.923.181
	Perluasan Pasar Produk Kreatif baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Rp	47.982.000	47.982.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Rp	77.971.500	77.971.500
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif terutama bagi usaha pemula	Rp	72.027.500	172.027.500
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Rp	434.510.215	614.838.420
	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Rp	209.509.975	289.838.225
	Perlindungan Hasil Kreatifitas	Rp	225.000.240	325.000.195

	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp 738.000.000	Rp 1.124.488.545
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Rp 738.000.000	Rp 1.124.488.545
	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Rp 144.978.300	Rp 170.687.920
	Pelatihan berbasis kompetensi bidang Homestay dan Pemandu wisata (Tour Guide) tingkat Lanjutan	Rp 179.935.700	Rp 280.639.150
	Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan Konservasi ekonomi kreatif	Rp 413.086.000	Rp 673.161.475
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 10.694.584.081	Rp 12.072.410.514
4. Nilai SAKIP	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 680.165.450	Rp 950.792.050
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 662.665.450	Rp 948.292.050
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 15.000.000	
5. Capaian realisasi anggaran	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 8.269.469.746	Rp 8.424.750.041
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 6.787.933.746	Rp 6.837.934.041
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 1.414.536.000	Rp 1.519.386.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 67.000.000	Rp 67.430.000
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp 94.000.000	Rp 197.853.800
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 94.000.000	Rp 197.853.800
6. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 65.776.000	Rp 85.305.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 44.771.000	Rp 63.600.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 21.005.000	Rp 21.705.000

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	209.556.234	Rp	331.317.356
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	13.034.784	Rp	26.635.056
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	78.245.000	Rp	83.619.125
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	33.447.450	Rp	33.462.175
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	84.829.000	Rp	187.601.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	365.930.000	Rp	623.978.750
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
	Pengadaan Mebel	Rp		Rp	24.293.750
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	365.930.000	Rp	599.685.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	496.347.451	Rp	710.711.317
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	1.228.000	Rp	1.228.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	206.817.592	Rp	216.501.192
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	288.301.859	Rp	492.982.125
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	513.339.200	Rp	747.702.200
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	281.389.200	Rp	348.702.200
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Peizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	22.750.000	Rp	39.800.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	209.200.000	Rp	359.200.000
	J U M L A H	Rp	15.611.633.746	Rp	23.184.113.746

2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI	KETERANGAN
1. Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata	Nilai Tambah Sektor Pariwisata	0,02 %	0,02 %	
2. Meningkatnya Jumlah Arus Kunjungan Wisatawan Nusantara	Jumlah Arus Kunjungan Wisatawan Nusantara	1.427.237 orang	1.317.958 orang	
3. Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	0,05 %	0,05 %	

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

PERJANJIAN KINERJA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata	Nilai Tambah Sektor Pariwisata	0.02
2	Meningkatnya Jumlah Arus Kunjungan Wisatawan Nusantara (Orang)	Jumlah Arus Kunjungan Wisatawan Nusantara	1.427.237
3	Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	0.05

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA 2022

3.1 A. Capaian Kinerja

Secara umum, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dalam memenuhi tugas dan fungsi yang harus diwujudkan tahun 2022 maka ditetapkan dalam 3 sasaran dan 3 indikator. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran sehingga diperoleh tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing sasaran. Langkah-langkah yang dilakukan terlebih dahulu membandingkan antara rencana kerja dengan realisasi untuk masing-masing komponen sasaran sehingga diperoleh capaian tiap komponen dengan rata-rata seluruh sasaran. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal dan internal tentang sejauhmana pelaksanaan misi organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI	CAPAIAN %	KETERANGAN
Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata	Nilai Tambah Sektor Pariwisata	0.02	0,02	100 %	
Meningkatnya Jumlah Arus Kunjungan Wisatawan Nusantara (Orang)	Jumlah Arus Kunjungan Wisatawan Nusantara	1.427.237	1.317.958	92,34 %	
Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	0.05	0,05	100 %	

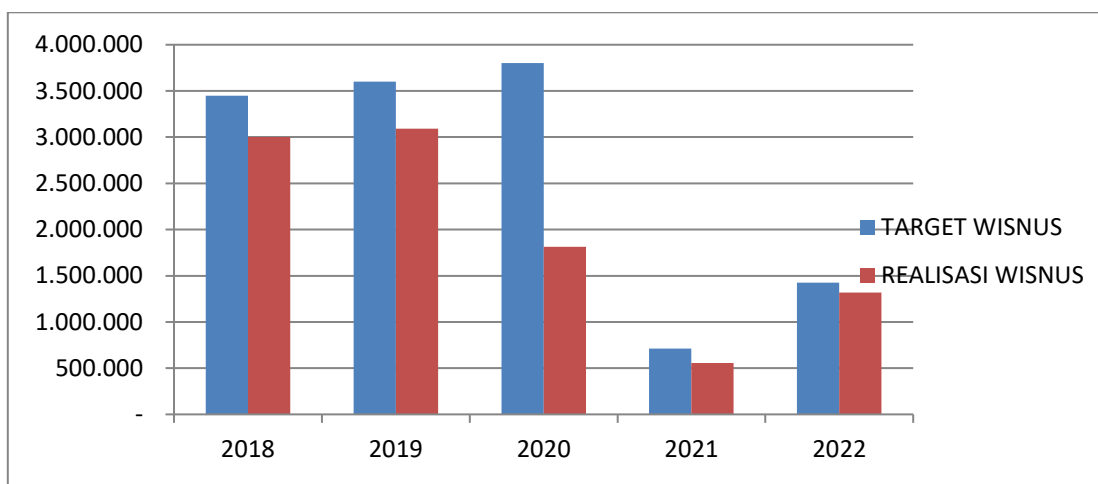
Pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah untuk masing-masing sasaran tahun 2022 telah melaksanakan tugas kerja utama yang menjadi tanggungjawab Dinas Pariwisata.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2018 – 2022

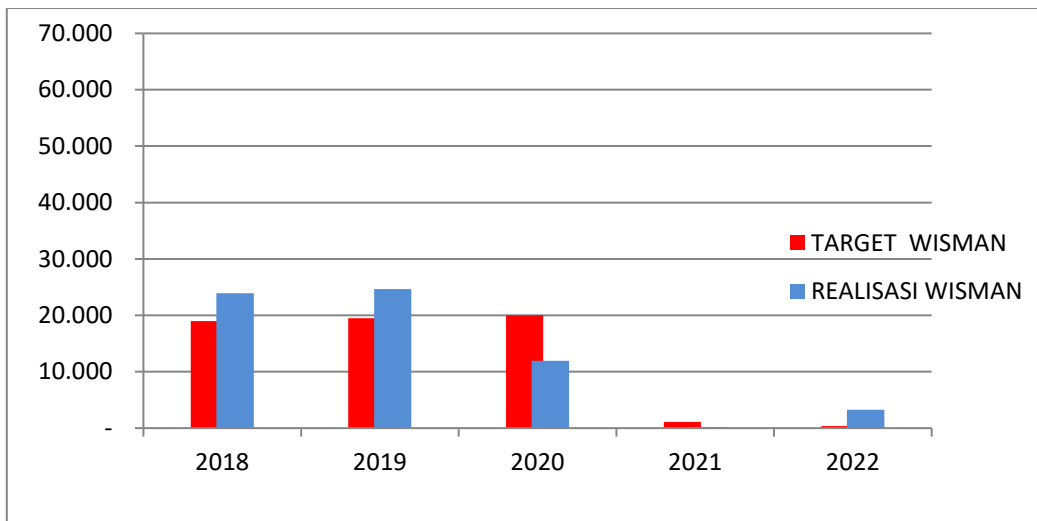
Perkembangan tingkat kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Sulawesi Tengah dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 cukup fluktuatif. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2018 – 2022

NO.	TAHUN	WISATAWAN NUSANTARA (WISNUS)		CAPAIAN (%)
		TARGET (Org)	REALISASI (Org)	
1	2018	3.450.000	3.000.166	87 %
2	2019	3.600.000	3.090.171	86 %
3	2020	3.800.000	1.812.995	47,7 %
4	2021	713.618	555.235	77,8 %
5	2022	1.427.237	1.317.958	92,34 %



NO.	TAHUN	WISATAWAN MANCANEGERA (WISMAN)		CAPAIAN (%)
		TARGET (Org)	REALISASI (Org)	
1	2018	19.000	23.942	126 %
2	2019	19.500	24.660	126 %
3	2020	20.000	11.921	59,60 %
4	2021	1.085	174	16%
5	2022	374	3.280	877 %



Perkembangan tingkat kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sulawesi Tengah dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 secara umum cukup berfluktuasi. Pada tahun 2018 jumlah wisman berkunjung ke Sulawesi Tengah sedikit mengalami penurunan di beberapa wilayah yang disebabkan adanya bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang melanda Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong. Kemudian pada tahun 2019 jumlah wisman berkunjung ke Sulawesi Tengah kembali mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan terutama di wilayah yang tidak terdampak bencana.

Selanjutnya untuk tahun 2020 adalah tahun dimana sektor pariwisata mengalami dampak yang sangat signifikan akibat merebak dan menyebarnya pandemi virus corona (covid 19). Kunjungan wisatawan mancanegara hanya berjumlah 11.921 orang (59,60 %) sangat jauh mengalami penyusutan dan ini terjadi secara global, di seluruh dunia. Mobilitas masyarakat yang terbatas dengan diberlakukannya lockdown di mancanegara dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di dalam negeri serta penutupan berbagai tempat rekreasi dan wisata sebagai bentuk antisipasi penyebaran pandemi, berimbas besar terhadap perputaran roda ekonomi, termasuk juga pada pengurangan tenaga kerja di sektor pariwisata. Keadaan ini masih tetap berlanjut hingga ke Tahun 2021, dimana jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara hanya mampu mencapai jumlah 174 orang atau hanya sebesar 16 % saja. Tetapi di tahun 2022, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 202 % sangat jauh perbandingannya dari tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara ke Sulawesi Tengah pada Tahun 2018 pun mengalami penurunan dengan jumlah kunjungan sebanyak 3.000.166 dengan capaian 87%, kemudian tahun 2019 dengan jumlah kunjungan sebanyak 3.090.171 orang dengan capaian 86%. Seperti halnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan nusantara pun terimbas dengan adanya pandemi covid 19, yakni hanya sebesar 1.812.995 orang atau hanya mencapai 47,7 %. Berbeda dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, di tahun 2021 jumlah kunjungan dari wisatawan Nusantara mencapai 77,8 % dari target yang ditetapkan. Demikian pula di tahun 2022, jumlah kunjungan wisatawan nusantara sangat meningkat, yakni sebesar 92,34 % dari tahun sebelumnya.

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara ini disebabkan antara lain pemberlakuan perjalanan wisata dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dengan persyaratan wajib vaksin covid-19 sebanyak 3 tahap. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya himbauan dari Pemerintah untuk memotivasi masyarakat agar mau berwisata di dalam negeri saja, salah satunya melalui publikasi di media sosial dengan hastag #ayoberwisata dan #diindonesiaaja. Seiring dengan pelaksanaan program pemerintah untuk melakukan vaksin 2 tahap dan vaksin booster, yang sudah menyebar dan merata ke seluruh wilayah Indonesia, di tahun 2022 ini perlahan pariwisata Indonesia mulai bangkit kembali yang turut berdampak pada sektor ekonomi kreatif, berputarnya kembali roda perekonomian masyarakat yang diperoleh dari kunjungan wisatawan baik wisatawan Mancanegara maupun wisatawan Nusantara.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir RPJMD

Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Pariwisata dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan
Target RPJMD Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2022	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata	Nilai Tambah Sektor Pariwisata	0.02 %	0,02 %	100%
2.	Meningkatnya Jumlah Arus Kunjungan Wisatawan Nusantara (Orang)	Jumlah Arus Kunjungan Wisatawan Nusantara	1.427.237	1.317.958	92,34%
3.	Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	0.05 %	0,05 %	

D. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Perencanaan pembangunan pariwisata Sulawesi Tengah memerlukan sebuah analisis faktor lingkungan internal berupa kekuatan (Strenght) dan kelemahan (weaknesses) dan juga perlu memperhatikan faktor lingkungan eksternal yang meliputi peluang (opportunities) dan tantangan (threaths).

Untuk mengembangkan sektor pariwisata di Sulawesi Tengah, kedua faktor ini sangat diperlukan untuk mengetahui peluang serta kendala apa saja yang harus dipertimbangkan untuk selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam tahap selanjutnya yaitu perencanaan.

1. Kekuatan (Strengths)

- Posisi Sulawesi Tengah yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur.
- Posisi Sulawesi Tengah sangat strategis karena diapit oleh 2 Daerah yang mempunyai Destinasi Wisata Super Prioritas yaitu Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

- Potensi sumber daya alam dan budaya yang sangat beragam dan memadai untuk mengembangkan sektor kepariwisataan.
- Tersedianya obyek wisata alam dan budaya yang unik dan menarik, bervariasi, dan sebagian masih asli dan alami.
- Memiliki keragaman budaya yang tersebar di 12 etnis pada 12 Kabupaten dan 1 Kota.
- Bertambahnya jumlah usaha wisata karena adanya kemudahan yang diberikan oleh pemerintah untuk berinvestasi di bidang pariwisata.
- Pemerintah Daerah mendorong terciptanya kreasi dan kreatifitas masyarakat agar dapat meningkatkan pendapatan perekonomiannya, dengan melaksanakan berbagai pelatihan ketrampilan usaha.
- Adanya dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah untuk mendorong pengembangan pariwisata di daerah Sulawesi Tengah.
- Adanya kerjasama yang baik di bidang promosi pariwisata antara pemerintah, pemerintah daerah dan swasta yang semakin meningkat.
- Pengembangan potensi wisata Geowisata, Geopark dan Cagar Biosfer

2. Kelemahan (Weaknesses)

- Kualitas kemampuan SDM profesional bidang pariwisata belum optimal.
- Ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata masih terbatas meliputi aksesibilitas dan amenities.
- Data base pariwisata yang tersedia belum mampu mendukung kebutuhan dalam proses pengambilan keputusan untuk pengembangan sektor pariwisata.
- Belum optimalnya pengelolaan destinasi, khususnya dalam pengemasan daya tarik wisata ke dalam produk wisata dan paket-paket wisata.
- Bandara Mutiara SIS Aldjufri belum menjadi Bandara Internasional dan tidak/belum beroperasinya kembali aktifitas di beberapa Bandara Kabupaten.
- Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan keragaman seni budaya berupa asset seni dan film nasional menjadi sebuah produk yang siap saji.

- Promosi dan pemasaran produk pariwisata belum terlaksana secara optimal dan terpadu di antara pihak yang terkait.

3. Peluang (Opportunities)

- Adanya komitmen pemerintah menjadikan Sektor Pariwisata sebagai salah satu sumber utama devisa negara.
- Kondisi keamanan daerah Sulawesi Tengah semakin kondusif dan terbukanya peluang berinvestasi di sektor pariwisata.
- Meningkatnya kembali minat masyarakat internasional untuk mengadakan perjalanan wisata, setelah pandemic covid-19 mereda.
- Adanya objek wisata unggulan yang memiliki daya tarik dan keunikan serta banyaknya bermunculan destinasi wisata baru.
- Meningkatnya minat masyarakat melewati weekend ataupun long weekend untuk staycation di hotel, penginapan maupun di destinasi wisata.
- Makin matangnya tingkat kehidupan berdemokrasi, sehingga membuka kesempatan besar bagi seniman dan budayawan dalam menciptakan karya seni dan film.
- Meningkatnya jumlah lembaga / swasta / masyarakat luar negeri yang tertarik akan kekayaan budaya bangsa baik berupa peninggalan sejarah purbakala dan budaya bangsa maupun budaya non material (intangible)
- Kondisi pemerintahan yang semakin stabil, sehingga memberikan peluang lebih besar untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan infrastruktur kepariwisataan.

4. Ancaman (Threats)

- Persaingan yang semakin tinggi antara negara khususnya ASEAN dalam upaya menarik wisatawan manca negara sebanyak-banyaknya.
- Masih terbatasnya sarana infrastruktur dan aksesibilitas ke lokasi objek wisata.
- Kekayaan budaya bangsa baik yang berupa benda (tangible) dan yang bukan benda (intangible) belum dikelola secara sinergis dalam rangka pembangunan nasional.

E. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada tahun 2022 Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang penjabarannya dalam visi, misi yang dituangkan dalam beberapa program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja, yaitu :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi

Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi

2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif

Kegiatan : Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan

3.2 Efisiensi Anggaran dan Realisasi Anggaran

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Pada tahun 2022 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 22.237.996.844,- sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 23.184.113.746,- Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 4,8%. Persentase efisiensi ini secara teori masih sangat kecil akan tetapi efektifitas penggunaan anggarannya tetap tercapai. Hal ini dilihat dari persentase realisasi penyerapan anggaran Dinas Pariwisata Tahun 2022 sebesar 95,92 %. Demikian pula pada level kegiatan nampak adanya efisiensi penggunaan sumber daya pada beberapa kegiatan.

Pada tahun 2022, Dinas Pariwisata memperoleh alokasi anggaran dana **sebesar Rp. 23.184.113.746,- terserap sebesar Rp. 22.237.996.844,- (95,92 %)** diantaranya ada beberapa program dan yang mendukung realisasi anggaran seperti tabel dibawah ini :

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG REALISASI ANGGARAN DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	Meningkatkan kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap perekonomian daerah	1. Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata	0,02%	0,02%	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp 2.685.261.086	Rp 2.599.597.435	96,81	
					Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Rp 40.234.600	Rp 39.956.800		
					Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rp 15.400.000	Rp 13.685.930		
		2. Meningkatnya Jumlah Arus Kunjungan Wisatawan Nusanantara (orang)	1.427.237	749.567	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp 2.462.743.486	Rp 2.388.513.705		
					Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp 166.883.000	Rp 157.441.000		
					PEMASARAN PARIWISATA	Rp 5.240.211.000	Rp 5.086.845.550	97,07	
		3. Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	0,05%	0,05%	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rp 5.240.211.000	Rp 5.086.845.550		
					PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Rp 2.061.742.601	Rp 1.955.897.087	94,87	
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Rp 1.446.904.181	Rp 1.429.927.615		
					Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Rp 614.838.420	Rp 525.969.472		
					PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp 1.124.488.545	Rp 1.112.828.727	98,96	
					Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Rp 1.124.488.545	Rp 1.112.828.727		
2	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	1. Capaian realisasi anggaran	97%	95,92%	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 12.072.410.514	Rp 11.482.828.045	95,12	
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 950.792.050	Rp 929.207.200		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 8.424.750.041	Rp 7.869.270.446		
		2. Nilai SAKIP Dinas Pariwisata	80	-	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp 197.853.800	Rp 194.832.900		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 85.305.000	Rp 85.280.000		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 331.317.356	Rp 330.154.939		
		3. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	62	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 623.978.750	Rp 622.890.500		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 710.711.317	Rp 704.856.111		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 747.702.200	Rp 746.335.949		
					JUM L A H		Rp 23.184.113.746	Rp 22.237.996.844	95,92

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Secara umum Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Adapun rumusan tujuan sasaran strategis pembangunan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yakni :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktifitas sektor unggulan daerah
 - Meningkatnya PDRB sektor unggulan daerah
2. Menurunkan kemiskinan
 - Menurunnya penduduk miskin perkotaan dan perdesaan

Tujuan Sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, seluruhnya telah selesai dilaksanakan dan telah berhasil dengan baik dengan capaian kinerja 95,92 %. Proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam pencapaian kinerja, dari 4 program dan 8 kegiatan yang ditetapkan, semua telah mencapai kinerja sasaran yang diharapkan. Dari capaian tersebut, sudah sesuai dengan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat. Hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian program ini adalah pada tingkat hasil (Outcome). Organisasi telah dapat menyajikan realisasi keuangan berdasarkan capaian masing-masing sasaran baik program maupun kegiatan.

B. Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kinerja

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja yang dicapai serta agar lebih efektif pelaksanaan kegiatan yang berhubungan pada pencapaian sasaran dan strategis maka di rekomendasikan beberapa hal antara lain :

1. Untuk lebih meningkatkan kinerja Aparatur maka diperlukan peningkatan kualitas SDM secara bertahap sesuai kondisi keuangan yang dimiliki.
2. Perlunya pembangunan sarana dan prasarana Pariwisata yang dimiliki kab/kota dengan memperhatikan kemampuan anggaran.
3. Penentuan target indikator pada semua tataran agar ditetapkan sesuai dengan kemampuan dan alokasi dana final yang telah ditetapkan sehingga tidak menyulitkan dalam pencapaian target indikator.
4. Untuk program kegiatan yang dibiayai oleh pusat (APBN/Pembantuan) agar dilakukan koordinasi baik ditingkat Propinsi/Kabupaten/Kota maupun ditingkat Pusat agar sinkronisasi anggaran program dengan APBD dapat direncanakan sesuai dengan RENSTRA yang telah ditetapkan bersama.

**KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

**Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680825 199403 2**